

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia terus melakukan percepatan pemerataan pembangunan nasional dengan terus membenahi peraturan pemerintahan daerah demi memaksimalkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penanggungjawab dan pengelola dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan oleh pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan otonomi daerah dan prinsip UUD 1945 (UU No. 9 Tahun 2015).

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dijalankan di Indonesia lebih dari 20 tahun yang dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Nuryani & Firmansyah, 2020). Penerapan dari desentralisasi fiskal yang baik erat kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah (Nuryani & Firmansyah, 2020). Namun, tidak semua daerah dapat menerapkan konsep desentralisasi fiskal dengan baik khususnya pelayanan dasar yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kualitas laporan keuangan adalah standar yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri menunjukkan apakah pemerintah telah berjalan dengan baik, jadi pemerintah dapat membuat laporan keuangan harus berisi informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna dengan memungkinkan mereka menilai peristiwa masa lalu atau saat ini dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengatasan kemiskinan.

Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Tahun Anggaran (TA) 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Masmudi S.E., M.Si., CSFA., CA., Ak Kepada PJ Bupati Aceh Utara Azwardi AP MS di aula Gedung BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (17/04/23).

**Tabel 1.1 Perkembangan LKPD Kabupaten Aceh Utara**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini BPK</b>
2009	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
2010	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI telah diolah kembali, 2022.

Walau sudah kali kedelapan mengantongi opini WTP, laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Utara masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diantaranya yaitu: (1) Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (2) Honorarium tim pelaksana kegiatan, sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan tim pengelola website tidak sesuai ketentuan. (3) Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. (4) Pembayaran honorarium kegiatan tidak sesuai ketentuan. (5) Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak pada belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal. (6) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) belum tertib. (7) Penatausahaan kas belum tertib. (8) Penatausahaan aset tetap tidak tertib. (<https://aceh.bpk.go.id/2022>).

Dengan masih adanya beberapa catatan penting dari BPK walaupun tidak mempengaruhi opini WTP, supaya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh

Utara dapat diandalkan bagi pengguna khususnya bagi pengguna eksternal. Maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat melakukan perbaikan, supaya tidak ada lagi catatan dari BPK pada tahun yang akan datang.

Kualitas laporan keuangan juga dapat diukur dari: (1) Relevan. (2) Andal. (3) Dapat Dibandingkan. (4) dapat dipahami.

Menurut Jultri *et al.*, (2021) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *New Public Management*. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *New Public Management* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Vidyasari *et al.*, (2021) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Rahayu *et al.*, (2022) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh *The Influence Of Human Resource Competence, Implementation Of Government Accounting Standards And Regional Financial Accounting Systems*. Hasil penelitian menunjukkan *The Influence Of Human Resource Competence, Implementation Of Government Accounting Standards And Regional Financial Accounting Systems* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan

standar akuntansi, *new public management* dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*New Public Management* (NPM) adalah pendekatan manajemen yang diterapkan dalam sektor publik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Beberapa karakteristik utama dari *New Public Management* melibatkan orientasi pada hasil, pengukuran kinerja, penekanan pada efisiensi dan biaya, fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia, pemberian otonomi kepada unit-unit organisasi, dan penggunaan konsep pasar untuk meningkatkan efektivitas layanan. Menurut Jultri *et al* (2021) Meskipun NPM telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi sektor publik di beberapa wilayah, pendekatan ini juga mendapat kritik terkait

dengan potensialnya untuk mengabaikan aspek-aspek sosial dan nilai-nilai publik serta menciptakan ketidaksetaraan dalam layanan publik.

Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar disela-sela Kegiatan Rakornas Mengatakan, Kegiatan digitalisasi ini Menjadi momentum strategis bagi pemerintah aceh utara dalam upaya menekan angka inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan secara maksimal transaksi digital di daerah kabupaten Aceh Utara. Penerapan transaksi digital di lingkungan Pemkab Aceh Utara sudah seharusnya menjadi prioritas, karena hal ini terkait dengan pelayanan di era digital saat ini.

<https://aceh.tribunnews.com/2023/10/03/pj-bupati-aceh-utarahadiri-rakornas-percepatan-dan-perluasan-digitalisasi-daerahdi-jakarta?page=2>

Salah satu contoh aplikasi dalam *New Public Management* yaitu SIGNAL atau Samsat Digital Nasional. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat mengetahui Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ) di aplikasi tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak perlu mengantre berjam-jam hanya untuk membayar pajak kendaraan atau memeriksa layanan SAMSAT lainnya.

Publik Management adalah sebagai variabel pembaharuan yang di mana sangat penting dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh *New Public Management* terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif tergantung

kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Salah satu bentuk upaya konkret untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu bagian pemerintahan yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara wajib menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah diatur, yakni Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri/Permendagri No. 56 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Vidyasri *et al.*, (2021) Masalah yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban aparatur pemerintah yang masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan masih tidak jelas ruang lingkup dengan penggunaannya. Secara teoritis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability*, *responsibility*, dan *answerability*. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang

menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal maupun eksternal. Dan juga kecenderungan konsep akuntabilitas yang masih cenderung menekan pada akuntabilitas prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (*selected officials*) namun kurang menekankan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis tentang: “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *New Public Management*, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara” Tujuan dari penelitian adalah menguji dan menjelaskan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), *New Publik Management*, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana *New Public Management* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui Pengaruh New Public Management Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya dan pihak pengguna peneliti lainnya, manfaat tersebut antaran lain yaitu:

1. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang cara yang terbaik dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.